



Informasi Strategis

Jumat, 29 Januari 2021

Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat
Gedung AH Nasution Lt. 14

BIDANG DALAM NEGERI

DPR RI Dukung Pemerintah Keluarkan Panduan Pencegahan Radikalisme di Perkantoran

1

FAKTA

Pada tanggal 28 Januari 2021 di Jakarta, Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin menyatakan bahwa DPR RI sangat mendukung rencana pemerintah mengeluarkan panduan dan pencegahan radikalisme di lingkungan kerja perusahaan dengan tujuan untuk mengantisipasi maraknya radikalisme di lingkungan kerja BUMN dan swasta.

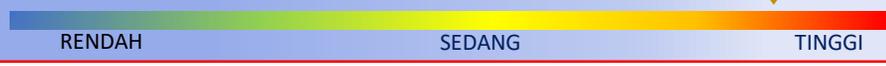
LEVEL KEPENTINGAN NASIONAL



LEVEL KEPENTINGAN PROVINSI



LEVEL KEPENTINGAN KABUPATEN



2

ANALISIS

Untuk menanggulangi terorisme, radikalisme dan ekstremisme diperlukan pemikiran luas dan komprehensif guna menemukan cara yang tepat dalam penanganannya agar tidak menimbulkan dampak yang dapat merugikan bangsa. Oleh karena itu, perlu diberikan panduan yang dapat menjelaskan kepada semua pihak, terutama bagi pegawai BUMN dan swasta harus dapat memberikan penyuluhan kepada seluruh pegawai mengenai bahaya terorisme, radikalisme dan ekstremisme. Dengan penyuluhan dan panduan tersebut, karyawan yang dipekerjakan dapat terseleksi dengan baik dan juga memperhatikan rekam jejak (*track record*). BUMN dan swasta serta kantor pemerintahan harus dapat melakukan seleksi karyawan yang akan masuk pada perusahaan dengan memperhatikan *track record* orang tersebut. Pihak-pihak tersebut dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan K/L terkait agar lebih mengena pada sasaran utama pelaksanaan seleksi maupun penyuluhan kepada karyawan atau pegawai, sehingga diharapkan mampu mencegah berkembangnya paham terorisme, radikalisme dan ekstremisme di Indonesia dengan *community policing* (Pemolisian Masyarakat).

3

DAMPAK

Dukungan DPR akan memperkuat posisi pemerintah dalam melaksanakan program pencegahan radikalisme yang berbasis kekerasan dan mengarah terorisme.

4

SARAN

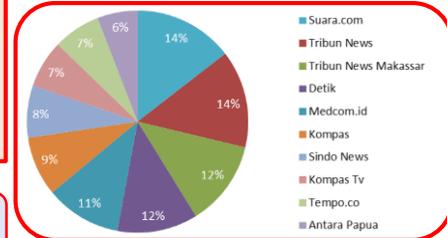
Kemhan mendukung pelaksanaan Perpres No. 7 Tahun 2021 dengan mengaplikasikannya dalam program bela negara untuk masyarakat serta membuat panduan pelaksanaan Perpres tersebut didalam internal Kemhan.

MEDIA EXPOSURE

289 Berita *Online* (Lokal/ Nasional)

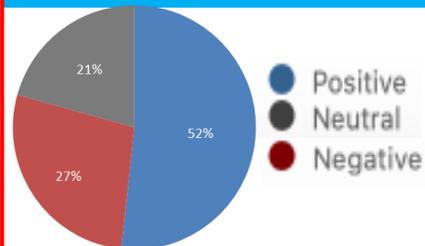
74 Cuitan Twitter

19 *Posting* Facebook

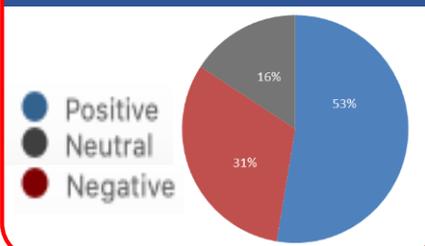


SENTIMENT PUBLIK

TWITTER



FACEBOOK



Presiden AS dan PM Jepang Lakukan Pembicaraan Perdana

1

FAKTA

Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga telah mengadakan pembicaraan telepon pada 28 Januari 2021. Presiden AS menegaskan kembali komitmen AS untuk membela Jepang, menegaskan kembali jaminan setelah era Trump. Biden juga menegaskan perlunya denuklirisasi lengkap Semenanjung Korea. Sebelumnya Trump secara terbuka mempertimbangkan penarikan pasukan dari Jepang dan Korea Selatan, dimana lebih dari 20.000 personel militer AS ditempatkan untuk mencegah tindakan militer Korea Utara.



2

ANALISIS

Pernyataan Joe Biden memberikan kepastian kelanjutan Kerjasama Jepang-AS yang selama ini telah berjalan. Hal ini juga memberikan dukungan bagi Jepang untuk melanjutkan kebijakan luar negeri dan pembangunan kekuatan pertahanan guna menyikapi perkembangan kawasan yang didominasi oleh meluasnya pengaruh China. Sebaliknya, kelanjutan Kerjasama AS-Jepang juga penting bagi AS untuk mempertahankan kehadirannya di kawasan.



INDIKATOR ANCAMAN TERHADAP KEPENTINGAN NASIONAL

AMAN

MENGKHAWATIRKAN

WASPADA

SIAGA

IMPLIKASI POLITIK

IMPLIKASI SOSIAL

IMPLIKASI EKONOMI

IMPLIKASI HUKUM

IMPLIKASI HANKAM

BERDAMPAK TIDAK LANGSUNG

3

DAMPAK

Komitmen jaminan perlindungan AS terhadap Jepang serta kelanjutan kerjasama kedua negara akan mendorong kelanjutan upaya AS-Jepang melalui the Quad untuk menghadang perluasan pengaruh China di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini akan mengakibatkan ketegangan situasi yang saat ini telah terjadi antara China dan Koalisi the Quad terus berlanjut.

4

SARAN

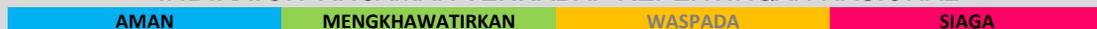
Kemhan RI meningkatkan kerjasama pertahanan dengan AS dan Jepang, selain itu melalui forum ADMM-Plus mengajak negara-negara mitra untuk menjaga perdamaian di kawasan.

Menu AS Antony Blinken: Mempromosikan Kepemimpinan AS Secara Global

1 FAKTA

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken, mengatakan bahwa saat ini dunia sedang mengamati bagaimana pemerintahan Presiden AS yang baru dibawah kepemimpinan Joe Biden terutama dalam kebijakan politik luar negeri, terutama akan mengubah arah dari pendekatan sebelumnya yakni Amerika yang pertama (*America First*). Blinken berjanji untuk membangun kembali tanggung jawab kedudukan dari posisi politik luar negeri AS, yang mengalami penurunan selama masa kepresidenan Trump. AS berupaya untuk saat ini akan memimpin dengan kekuatan teladan dengan menghargai diplomasi dengan sekutu dan mitra strategis untuk memenuhi tantangan besar saat ini dan masa yang akan datang. AS juga berkeinginan untuk diandalkan bagi para negara sekutu/alianasi dan mitra strategis termasuk Kanada, Meksiko, Jepang, dan Korea Selatan serta negara-negara lainnya. Dalam pernyataan lainnya, Blinken membahas mengenai beberapa isu strategis bagi AS, yakni seperti penunjukan pemberontak Houthi Yaman baru-baru ini sebagai organisasi teroris asing. Blinken juga menegaskan kembali janji untuk membangun kesepakatan normalisasi antara Israel dan UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko, yang ditengahi oleh pemerintahan Trump, termasuk komitmen dan mengamankan perjanjian tersebut. AS juga akan terus mengambil sikap keras terhadap China, sambil mencoba memperkuat aspek kooperatif dari hubungan itu, yang disebut hubungan paling penting yang dimiliki di dunia. Selain itu, ada juga terkait hubungan AS-Iran, yang merosot ke posisi terendah baru.

INDIKATOR ANCAMAN TERHADAP KEPENTINGAN NASIONAL



2 ANALISIS

Pemerintah AS dibawah kepemimpinan Biden dalam konteks politik luar negeri memang telah berjanji untuk membangun pemerintahan yang paling beragam dalam sejarah modern. Keinginan Biden untuk membentuk pemerintahan yang mencerminkan wajah AS sesungguhnya akan juga tercermin dalam politik luar negeri yakni penguatan diplomasi dan aliansi, pendekatan multilateralisme, konsistensi memelihara hubungan negara-negara sekutu dan mitra strategis serta lainnya. Terlepas dari pergeseran dalam sikap dan perspektif ini, permasalahan AS banyak masih dikaitkan dalam upaya menghadapi berbagai hambatan dan persyaratan keuangan, ekonomi, operasional, dan politik di luar negeri. Selain itu, melihat kebijakan AS terdahulu yang banyak memberikan dampak. Oleh karena itu, perubahannya oleh pemerintah Biden dipastikan akan mendapat halangan dan penentangan.

3 DAMPAK

Dampak dari kebijakan politik luar negeri AS yang diperkirakan akan berbeda dan berubah dibandingkan pemerintahan AS sebelumnya, dapat menghasilkan dari segi positif maupun negatif. Positifnya, bahwa AS siap mendorong dan mendukung pendekatan diplomasi secara *soft* dan mementingkan negosiasi dalam berbagai permasalahan regional maupun global. Walaupun kehadirannya akan semakin intens dan eksis, namun Indonesia dapat memanfaatkan hal tersebut sebagai peluang dan kesempatan dengan strategi yang tepat. Negatifnya adalah, dominasi dan intervensi AS pada kepentingan-kepentingan masing-masing negara akan sangat kuat dan mempengaruhi beberapa kebijakan nasional tentunya jika tidak adanya fungsi kontrol dan pengendalian dari pemerintah masing-masing negara.

4 SARAN

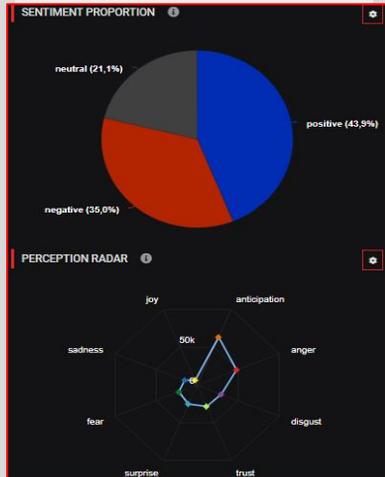
Kemhan mendukung Kemlu dalam konteks prioritas politik luar negeri di tahun 2021, terkait diperlukannya *collective global leadership* dalam mengatasi ancaman dan tantangan keamanan saat ini dan masa yang akan datang dengan terus berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas dunia. Indonesia juga mampu menunjukkan konsistensinya dalam menjalankan prinsip-prinsip hukum internasional termasuk mengedepankan kepentingan nasional dan mempertahankan wilayah kedaulatan NKRI dengan baik dan benar.

BIDANG MEDIA SOSIAL > VAKSIN COVID-19

Kemendes Memperbaharui Cara Pendaftaran Penerima Vaksin

1 Berdasarkan data Intelligence Socio Analytics (ISA) tanggal 28 Januari 2021, pukul 16.00 WB, isu vaksin Covid-19 dalam perbincangan di Medsos, khususnya platform Twitter mengalami *trend* penurunan, dengan proporsi sentimen positif 43,9%, negatif 35,0%, dan netral 21,1%, dimana persepsi netizen cenderung ke arah antisipasi dan kemarahan. Pada tanggal 27 Januari 2021, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa untuk mempercepat tercapainya target vaksinasi di Indonesia maka pendaftaran penerima vaksin Covid-19 yang semula *online*, saat ini dapat dilakukan manual.

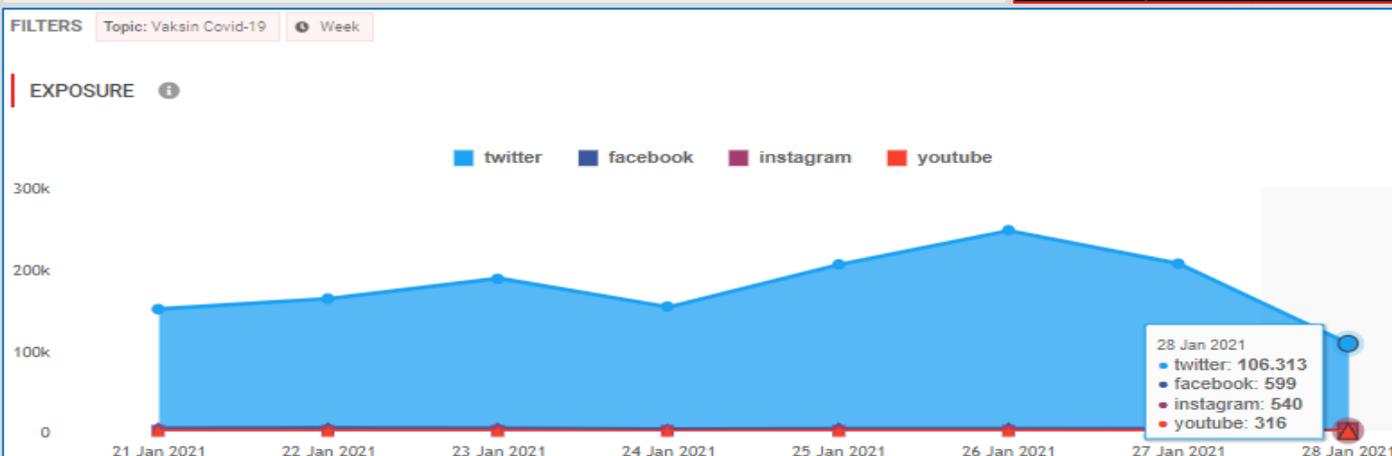
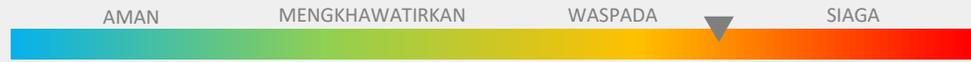
FAKTA



LEVEL ANCAMAN ISU VAKSIN COVID-19 DARI MEDSOS DALAM NEGERI



LEVEL ANCAMAN ISU VAKSIN COVID-19 DARI MEDSOS LUAR NEGERI



2 Guna mempercepat proses tercapainya target 70% populasi di Indonesia menerima vaksin Covid-19 untuk *herd-immunity*, atau sekitar 181,5 juta orang dalam Tahun 2021 sesuai arahan Presiden RI, maka *leading sector* program vaksinasi, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, perlu mengubah pendaftaran penerima vaksin yang semula *online*, dapat juga dilaksanakan manual. Hal ini disebabkan masih ditemukannya permasalahan validitas dan kemutakhiran data di Indonesia. Beragamnya institusi yang melakukan pendataan penduduk dan populasi untuk kepentingannya masing-masing menyebabkan terjadinya kesimpang-siuran tentang data yang paling valid dan mutakhir pada suatu masa tertentu. Hal ini perlu segera diatasi dengan melakukan sinkronisasi dan integrasi data oleh suatu lembaga khusus sehingga target Program Satu Data ke depan dapat optimal untuk mendukung program pemerintah, seperti program vaksinasi di masa mendatang.

ANALISIS

3 Masih ditemukannya permasalahan terkait data penerima vaksin di Indonesia akan menyebabkan beberapa hambatan dalam pelaksanaan vaksinasi sehingga dapat berdampak kepada tidak tercapainya target vaksinasi Covid-19 dalam setahun ini.

DAMPAK

4 Kemhan mendorong pemerintah untuk melanjutkan dan mengakselerasi Program Satu Data di Indonesia sehingga dapat optimal mendukung program pemerintah di masa mendatang.

SARAN

